



**PENGARUH KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA TERHADAP KASUS COVID 19
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI
KALIMANTAN BARAT)**

Ika Kurnia Indriani¹⁾, Hendri Prasetyo²⁾, Agus Widodo³⁾

^{1,2,3} Politeknik Negeri Pontianak

¹ikakurniaindriani@gmail.com, ²hendriprasetyo@gmail.com, ³widodoagus@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 18 November 2019

Disetujui : 1 Desember 2019

Dipublikasikan : 31 Januari 2020

ABSTRAK

Analisis kondisi keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan negara ditengah pandemi covid 19. Pandemi covid 19 menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah didalam mewujudkan tujuan negara. Pandemi covid 19 akan berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program kerja daerah. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi anggaran 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat dalam kondisi cukup baik selama tahun 2010 hingga 2019. Solvabilitas anggaran pemerintah dalam kondisi baik dengan nilai rasio 1,2015; 1,2013; 2,1793; dan 1,0128. kemandirian keuangan pemerintah berada dalam kondisi yang kurang baik akibat rentan terhadap sumber pendanaan lain yang ditunjukkan nilai rasio 0,0597 dan 0,0600. Solvabilitas layanan dalam kondisi yang baik dengan jumlah anggaran belanja dan belanja modal yang dapat membiayai penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp3.072.878 dan Rp705.509. Secara simultan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19 di wilayah kabupaten kota di Kalimantan barat. secara parsial rasio solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kasus covid 19.

Kata Kunci :

**Solvabilitas
Anggaran,
Kemandirian
Keuangan,
Solvabilitas
Anggaran,
Covid 19 dan
Pemerintah
daerah**

ABSTRACT

The analysis of financial conditions aims to provide an overview of the ability of the regions to carry out their duties and functions in order to realize the country's goals in the midst of the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic is a new challenge for local governments in realizing the country's goals. The COVID-19 pandemic will have a direct impact on regional financial management and the implementation of regional programs. this study uses a descriptive quantitative approach with secondary data in the form of a 2010-2019 budget realization report. The results showed that the financial condition of the district and city governments in West Kalimantan was in fairly good condition during 2010 to

Keywords :

**Budgetary
Solvency,
Financial
Independence,
Service-Level
Solvency,
Covid 19 and
Local
Government**

2019. *The solvency of the government budget was in good condition with a ratio value of 1.2015; 1,2013; 2.1793; and 1.0128. The government's financial independence is in low condition due to being vulnerable to other funding sources, as indicated by the ratio values of 0.0597 and 0.0600. The solvency of services is in good condition with the total budget and capital expenditures that can finance the provision of public services of Rp3.072.878 and Rp705.509, respectively. Simultaneously, financial conditions have a significant effect on COVID-19 cases in local government in West Kalimantan. partially the ratio of budget solvency, financial independence, and solvency of local government services have an effect on the covid 19 case.*

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat memiliki posisi strategis di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perkebunan menjadi komoditas utama di Kalimantan Barat. Namun, wilayah dengan sumber daya alam berlimpah tidak mencerminkan kondisi masyarakat daerah. Kesenjangan perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terjadi antara wilayah. Kesenjangan ini menimbulkan perbedaan kesejahteraan pembangunan dan kualitas hidup di masyarakat. Khususnya antar wilayah kota dan kabupaten. Kota sebagai pusat perekonomian menjadi acuan utama dalam kemajuan sebuah daerah. Hal ini terjadi di wilayah Kalimantan Barat dimana Kota Pontianak merupakan pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi dan Kabupaten Kayong Utara dengan PAD terendah. Secara geografis dan demografi Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luas wilayah 146.807 km² dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 5.414.390 jiwa (BPS RI, 2021). secara administratif Kalimantan Barat terdiri dari 2 pemerintah kota dan 12 pemerintah kabupaten. Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di pulau Kalimantan dengan wilayah yang cukup luas membawa dampak kepada kondisi keuangan pemerintah daerah. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten dan pemerintah kota di Kalimantan Barat, dengan jumlah anggaran yang terbatas diharuskan untuk tetap menjaga kondisi keuangan pemerintah daerah dengan baik.

Kondisi ini menjadi dasar untuk dilakukannya sebuah analisis mendalam bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa APBD merupakan salah satu instrument penting di dalam sebuah perekonomian daerah. Pemerintah kota pada umumnya menjadi sebuah acuan pertumbuhan ekonomi daerah, kualitas pelayanan publik, dan perkembangan pembangunan daerah. Pemerintah kota sebagai regulator yang menjalankan perannya untuk mencapai tujuan negara. Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat keadilan sosial dalam tujuan negara Indonesia. Tugas ini dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena sejak ditetapkannya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan negara pemerintah kota harus memiliki sebuah acuan tentang kondisi keuangan daerahnya. Analisis terhadap kondisi keuangan ini bermanfaat sebagai *early warning system* atau peringatan dini agar pengelolaan berjalan maksimal demi terwujudnya tujuan negara yang sejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Tantangan baru dihadapi oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat dengan hadirnya kejadian tidak terduga yaitu covid 19. Pandemi covid 19 membawa dampak

negatif kepada ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi daerah menurun hingga minus -4,46% pada triwulan ketiga tahun 2020 (BPS Kalimantan Barat, 2020). Pandemi covid 19 membawa dampak kepada perekonomian daerah. Pandemi covid 19 berdampak besar terhadap perekonomian dunia (Haruhiko, 2020). Pemerintah daerah menghadapi kehilangan besar atas pendapatan dan peningkatan belanja disebabkan oleh Covid 19 (Green & Loualiche, 2020). pandemi covid 19 banyak merubah kebijakan pemerintah daerah pada alokasi anggaran prioritas. pandemi diprediksi terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga kondisi ini menyebabkan munculnya tata cara baru didalam kehidupan masyarakat. Melalui juru bicara Satgas Penanganan Covid 19 Wiku Adisasmito pemerintah pusat tengah penyusunan strategi jangka panjang penanganan covid 19 dan strategi pemulihan ekonomi nasional (Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021).

Penilaian kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menggunakan pendekatan solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Pemerintah daerah di Indonesia memiliki tugas untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional ini dapat tercapai jika kondisi keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan dalam kondisi yang sehat. Pencapaian tujuan negara dapat dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Demi tercapainya tujuan negara pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat diseluruh bidang pelayanan publik. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah bahwa setiap Pemerintah Daerah diberikan hak untuk merancang kebijakannya sendiri untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan ini dituangkan dalam rencana strategis yang disusun berdasarkan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kondisi ini berdampak kepada program kegiatan program kegiatan yang berbeda. Oleh karena itu, akan berdampak kepada kondisi keuangan pemerintah daerah yang bervariasi. Proses pelaksanaan anggaran atau proses pelaksanaan program dan kegiatan diharuskan pemerintah daerah untuk berinteraksi kepada seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan yang ada disekitarnya. Penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat bertujuan untuk memberikan gambaran kemampuan keuangan pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan program kerja ditengah kondisi pandemi covid 19. Penilaian kondisi keuangan ini akan memberikan gambaran akan kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dengan optimal demi terwujudnya tujuan negara ditengah pandemi covid 19. Kondisi keuangan yang sehat akan memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi dan menanggulangi pandemi covid 19 di wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan fenomena yang sedang terjadi saat ini, memotivasi untuk dilaksanakannya penelitian dalam rangka penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Barat. Analisis ini akan menggunakan hipotesis sebagai dugaan awal. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H1 : Kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota secara simultan berpengaruh terhadap kasus covid 19.
- H2 : Rasio solvabilitas anggaran berpengaruh terhadap kasus covid 19.
- H3 : Rasio kemandirian keuangan berpengaruh terhadap kasus covid 19.
- H4 : Rasio solvabilitas layanan berpengaruh terhadap kasus covid 19.

KAJIAN TEORI

Solvabilitas Anggaran

Penilaian solvabilitas anggaran akan menggambarkan keseimbangan antara pendapatan rutin dan pengeluaran operasional pemerintah kabupaten/kota selama satu periode anggaran (Ritonga, 2014). Indikator solvabilitas anggaran akan menekankan kepada pendapatan dana alokasi khusus (DAK) sebagai pendapatan rutin pemerintah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh, jumlah pendapatan DAK tidak dapat dipastikan karena merupakan keputusan pemerintah pusat. Penghitungan solvabilitas anggaran akan membandingkan pendapatan dana alokasi khusus dengan seluruh belanja daerah dalam satu periode anggaran. Indikator ini dihitung dengan empat rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{(\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Belanja Operasional}}$$

$$\text{Rasio C} = \frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{(\text{Belanja Pegawai})}$$

$$\text{Rasio D} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}}$$

Penentuan hasil perhitungan solvabilitas anggaran dengan kriteria semakin tinggi nilai rasio solvabilitas anggaran akan menunjukkan semakin banyaknya pendapatan daerah yang tersedia untuk membiayai biaya operasional pemerintah daerah.

Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah kondisi keuangan pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendapatan diluar kendalinya baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (Ritonga, 2014). Penilaian kemandirian keuangan akan menghasilkan sebuah informasi tentang kekuatan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan segala program kerja yang telah direncanakan pada RAPBD.

Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan mengembangkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian indikator kemandirian keuangan dilakukan dengan dua rumus rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan merupakan indikator penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah yang menilai kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh

masyarakat Wang et al, dalam (Ritonga, 2014). Penilaian solvabilitas layanan akan membandingkan jumlah penduduk yang akan dilayani oleh pemerintah daerah dengan total belanja dan total belanja modal. Nilai belanja dan belanja modal merupakan representasi dari pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam mewujudkan program kerja selama satu periode anggaran. Selain itu, belanja modal merupakan pengeluaran yang memiliki dampak jangka panjang bagi daerah dan masyarakat. Penilaian solvabilitas layanan menggunakan rumus rasio, sebagai berikut:

$$\text{Rasio A} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Penduduk}}$$

$$\text{Rasio B} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Penduduk}}$$

Pemilihan ini dilakukan karena total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah merefleksikan seberapa besar anggaran yang dilakukan yang di realisasikan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan, belanja modal sangat kuat hubungannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada peningkatan pelayanan publik. Perhitungan solvabilitas layanan difokuskan kepada perbandingan antara total belanja terhadap total penduduk dan total belanja modal terhadap total penduduk. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas layanan akan menggambarkan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hal ini berdasarkan proses pengumpulan data dengan menetapkan terlebih dahulu variabel-variabel sebagai konsep dasar yang akan dihubungkan dengan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan teori penilaian kondisi keuangan. teori kondisi keuangan adalah teknik yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam UUD 1945. Teknik penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah dikembangkan untuk membantu daerah dalam menilai dampak keuangan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara (Ritonga, 2014). Penilaian kondisi keuangan disusun dalam enam indikator meliputi: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan (Ritonga, 2014). Pada penelitian ini fokus penilaian kondisi keuangan terdapat pada indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atau Laporan Realisasi APBD.
2. Pandemi covid 19 merupakan peristiwa yang baru terjadi pada tanggal 20 Maret 2020 hingga saat penelitian ini disusun pada tahun 2021.
3. Penangan pandemi covid 19 di pemerintah daerah relatif menggunakan strategi jangka pendek.
4. Indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan merupakan teknik yang dapat secara efektif menggambarkan kondisi keuangan daerah didalam menghadapi pandemi covid 19. Khususnya kemampuan daerah dalam

menangani kasus covid 19 dalam jangka pendek. Mayoritas pemerintah daerah masih melakukan penanganan jangka pendek atas pandemi covid 19 (OECD, 2020).

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatori. Eksplanatori adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variable-variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2018).

b. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang mungkin diperoleh melalui hasil perhitungan dan pengukuran yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat meliputi: Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang.

c. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Sample dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Barat.

d. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun anggaran 2010-2019. Data ini diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Data covid 19 merupakan data kasus konfirmasi yang diperoleh dari dinas kesehatan provinsi Kalimantan barat.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dengan mengakses laman portal data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>) dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (<https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-kalbar/>).

f. Teknik Analisis

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah melakukan analisis statistik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh kondisi keuangan daerah terhadap covid 19. Analisis statistik dibangun dengan membangun hipotesis berdasarkan rasio kondisi keuangan daerah yang dimiliki.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik data seperti mean, median modus, quartile, varian standar deviasi (Sujarweni, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

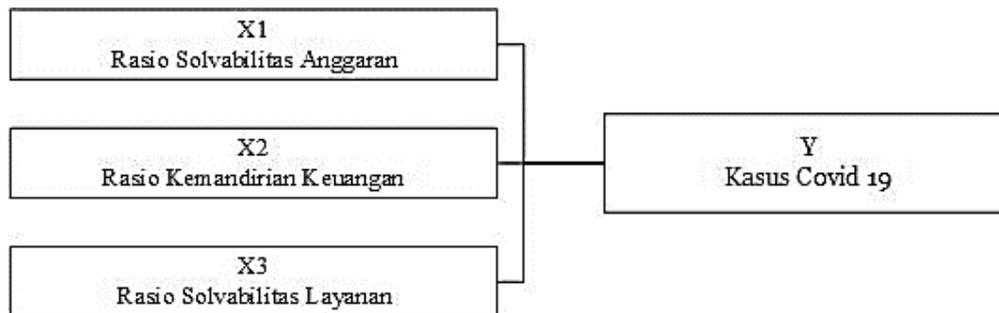
Model regresi linier berganda dapat disebut model yang baik jika memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik (Sujarweni, 2016). Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas.

3. Regresi Berganda

Regresi bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variable dependen dan variable independen (Sujarweni, 2016). Variable dependen adalah variable yang dipengaruhi, sedangkan variable independen adalah variable yang mempengaruhi (Sujarweni, 2016).

g. Kerangka Berpikir

kerangka berpikir merupakan suatu urutan logis dari peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk bagan



Gambar 1
Kerangka Berpikir

PEMBAHASAN

Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di Kalimantan Barat

Solvabilitas Anggaran

Analisis statistik deskriptif pada solvabilitas anggaran pemerintah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan adanya distribusi data yang tidak normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai skewness 8,089; negatif 0,023; 0,248; dan 8,042, sedangkan nilai kurtosis 83,964; negatif 0,557; negatif 0,980; dan 84.153. Oleh karena itu, untuk merepresentasikan populasi menggunakan nilai median (Ritonga, 2014). Median untuk rasio A adalah 1,2015; rasio B 1,2013; rasio C 2,1793; dan rasio D 1,0128. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2010 hingga 2019 memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi belanja operasinya. Berdasarkan perhitungan rasio dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki solvabilitas anggaran yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan untuk menutupi belanja. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota perlu berhati-hati di tahun anggaran yang akan datang agar tidak terjadi defisit operasi karena defisit operasi merupakan permulaan terjadinya kesulitan keuangan daerah (Ritonga, 2014). Pandemi covid 19 berdampak besar kepada ekonomi jangka pendek (Auerbach, Gale, Lutz, & Sheiner, 2020). pemerintah daerah melakukan penyesuaian kepada anggaran, untuk menurunkan dampak fisKal dari pendapatan dan belanja untuk menahan resesi dan mempercepat perbaikan ekonomi (Auerbach, Gale, Lutz, & Sheiner, 2020) . Penurunan pendapatan pemerintah daerah akan berdampak negatif pada anggaran, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik agar tidak meningkatkan jumlah hutang (OECD, 2020).

Kemandirian Keuangan

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa data rasio kemandirian keuangan tidak terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai skewness 2,295 dan 2,244 sedangkan nilai kurtosis 5,824 dan 5,494. Oleh karena itu, nilai median digunakan untuk mencerminkan populasi (Ritonga, 2014). Nilai median dari rasio A 0,0597 dan rasio B 0,0600. Kondisi ini berarti bahwa hanya 5,97% dari pendapatan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat yang berada di bawah kendali mereka. Penilaian mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki kemandirian keuangan yang lemah. Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 hingga 2019 kemandirian keuangan pemerintah kabupaten dan kota masih cukup lemah, karena mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Kondisi ini dapat diakibatkan oleh berlakunya aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh sumber daya alam yang signifikan mempengaruhi kehidupan rakyat dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat (Ritonga, 2014). Hal ini menyebabkan pemerintah daerah hanya mengelola sumber pendapatan non strategis yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor rendahnya kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang meningkat dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor potensial seperti sektor konstruksi, manufaktur, dan perdagangan (Maizunati, 2017). Indikator kemandirian keuangan yang meningkat menjadi indikator pemerintah daerah dapat mengeksplorasi sumber pendapatan baru (Maizunati, 2017). Pandemi covid 19 dapat membawa kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menurun. Pembatasan aktifitas masyarakat akan berdampak kepada penurunan ekonomi daerah. Hal ini akan berdampak kepada menurunnya pendapatan pajak dan retribusi selama pandemi covid 19. Pemerintah daerah mengalami kehilangan pendapatan dari pajak, penangguhan pembayaran pajak dari masyarakat, dan penurunan pajak properti selama pandemi (Green & Loualiche, 2020).

Solvabilitas Layanan

Analisis deskriptif solvabilitas layanan pada pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat menggunakan Laporan Realisasi Anggaran 2010-2019. Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada solvabilitas layanan diperoleh nilai skewness 1,047 dan 0,941 sedangkan nilai kurtosis 1,020 dan 0,517. Hal ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas layanan tidak terdistribusi normal sehingga nilai median digunakan untuk merepresentasikan populasi (Ritonga, 2014). Nilai median dari kedua rasio menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat memiliki total belanja sebesar Rp3.072.878 dan total belanja modal sebesar Rp705.509 untuk menyelenggarakan pelayanan publik untuk per individu. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas layanan yang diperoleh maka semakin baik pula kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Ritonga, 2014). Secara umum solvabilitas layanan di wilayah kabupaten dan kota mengalami fluktuasi. Pemerintah Kabupaten dan kota diharuskan mampu mempertahankan jumlah belanja dan belanja modal yang dialokasikan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Indikator solvabilitas layanan sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan inflasi di daerah (Maizunati, 2017). Upaya pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dapat terlihat dari peningkatan nilai rasio solvabilitas layanannya (Cipto, 2018).

Tabel 1
Statistics

		Solvabilitas Anggaran				Kemandirian Keuangan		Solvabilitas Layanan	
		Rasio A	Rasio B	Rasio C	Rasio D	Rasio A	Rasio B	Rasio A	Rasio B
N	Valid	140	140	140	140	140	140	140	140
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		1.2076	1.1851	2.2011	1.0151	.0721	.0739	3221610.8839	848963.5444
Std. Error of Mean		.02556	.01201	.03021	.00874	.00454	.00474	108497.54867	34082.31275
Median		1.2015	1.2013	2.1793	1.0128	.0597	.0600	3072878.8878	705509.5893
Std. Deviation		.30243	.14207	.35740	.10341	.05371	.05611	1283760.30835	403267.36284
Variance		.091	.020	.128	.011	.003	.003	1648040529300.058	162624565930.991
Skewness		8.089	-.023	.248	8.042	2.295	2.244	1.047	.941
Std. Error of Skewness		.205	.205	.205	.205	.205	.205	.205	.205
Kurtosis		83.964	-.557	-.980	84.153	5.824	5.494	1.020	.517
Std. Error of Kurtosis		.407	.407	.407	.407	.407	.407	.407	.407
Range		3.48	.71	1.49	1.24	.29	.30	6031003.82	1926307.87
Minimum		.86	.86	1.59	.85	.02	.02	1214428.68	255068.98
Maximum		4.34	1.58	3.08	2.09	.31	.31	7245432.50	2181376.85
Sum		169.06	165.92	308.16	142.12	10.09	10.35	451025523.74	118854896.22

Hasil Analisis statistik

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

PENGARUH KONDISI KEUANGAN TERHADAP KASUS COVID 19

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap variable-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif dari rasio solvabilitas anggaran, rasio kemandirian keuangan, dan rasio solvabilitas anggaran sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis deskriptif statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Solvabilitas Anggaran	140	.88	2.58	1.1960	.18366
Rasio Kemandirian Keuangan	140	.02	.31	.0730	.05475
Rasio Solvabilitas Layanan	140	13.56	15.37	14.4501	.39067
Kasus Covid 19	140	5.81	8.15	6.8143	.60978
Valid N (listwise)	140				

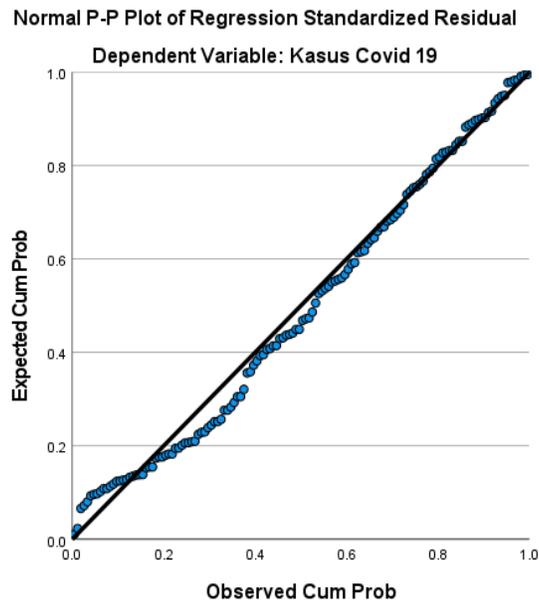
Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah data yang valid untuk diproses adalah 140. Rata-rata kasus covid 19 adalah 5,81 dengan standar deviasi 0,60978. Rata-rata rasio solvabilitas anggaran sebesar 1,1960 dengan standar deviasi sebesar 0,18366. Rasio kemandirian keuangan memiliki rata-rata 0,0730 dengan standar deviasi 0,05475. Rasio solvabilitas layanan memiliki rata-rata 14,4501 dengan standar deviasi 0,3967. Hasil analisis statistik deskriptif mengindikasikan bahwa nilai rata-rata dari masing-masing variabel yang dihasilkan lebih besar dari standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dalam kondisi yang baik. Menghadapi kejadian tidak terduga seperti covid 19 membutuhkan kondisi keuangan yang baik. Anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu pendukung dalam proses penanggulangan pandemi covid 19. Anggaran pemerintah daerah akan membantu pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid 19 (National Association of Countries, 2020).

Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi untuk variable terkait (dependen) dan variable bebas (independen) keduanya mempunyai kondisi distribusi normal atau tidak (Sujarweni, 2016). Penelitian menggunakan grafik *normal p-p of regression standardized residual* sebagai alat uji. Jika data menyebar disekitar garis diagonal pada grafik tersebut dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun, jika data menyebar menjauh dari garis diagonal maka tidak memenuhi asumsi normalitas. Pada gambar 1. Grafik *normal p-p of regression standardized residual* menunjukkan persebaran data yang mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1
Normal P-P of Regression Standardized Residual
sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Pada tampilan grafik normal P Plot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi normal. Untuk memperkuat hasil tersebut, maka dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hasil uji Kolmogorov Smirnov terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Rasio Solvabilitas Anggaran	Rasio Kemandirian Keuangan	Rasio Solvabilitas Layanan	Kasus Covid 19
N		140	140	140	140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.1960	.0730	14.4501	6.8143
	Std. Deviation	.18366	.05475	.39067	.60978
Most Extreme Differences	Absolute	.093	.201	.063	.147
	Positive	.093	.201	.063	.147
	Negative	-.066	-.154	-.027	-.075
Test Statistic		.093	.201	.063	.147
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.005	<.001	.200 ^e	<.001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.005	.000	.187	.000
99% Confidence Interval	Lower Bound	.003	.000	.177	.000
	Upper Bound	.007	.000	.197	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

e. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig untuk variable Y (kasus covid 19) adalah <0,01; variabel X1 (rasio solvabilitas anggaran) 0,05; variable X2 (rasio kemandirian keuangan) <0,01; dan variable X3 (rasio solvabilitas layanan) 0,200; Berdasarkan pengujian Kolmogorov Smirnov maka dapat disimpulkan bahwa data berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov data yang terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk melihat korelasi antara model regresi dengan variabel independen (Sujarweni, 2016). Dalam pengambilan keputusan maka digunakan kriteria jika nilai VIF > 10 maka ada multikolinearitas dalam model regresi dan jika nilai VIF < 10 maka tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	15.655	1.396		11.211	<,001		
Rasio Solvabilitas Anggaran	-.412	.202	-.124	-2.042	.043	.921	1.086
Rasio Kemandirian Keuangan	6.545	.678	.588	9.653	<,001	.917	1.091
Rasio Solvabilitas Layanan	-.611	.093	-.391	-6.576	<,001	.959	1.042

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada variable dependen diperoleh nilai VIF untuk rasio solvabilitas anggaran 1,086; rasio kemandirian keuangan 1,091; dan rasio solvabilitas layanan 1,042. Disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam regresi.

c. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi terjadi pada variabel yang menggunakan data runtun waktu atau time series seperti penelitian ini kondisi keuangan daerah tahun 2010-2019. Autokorelasi di uji dengan Durbin Watson. Nilai Durbin Watson dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 ^a	.538	.528	.41904	2.313

a. Predictors: (Constant), Rasio Solvabilitas Layanan, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Kemandirian Keuangan

b. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan pada tabel 4, nilai Durbin Watson (DW) diterjemahkan dalam perhitungan berikut ini:

$N = 140$

$K = 3$

$dl = 1,6804$ $4 - dl = 2,3196$

$du = 1,7678$ $4 - du = 2,2322$

Kesimpulan yang kita ambil adalah $DW = 2,313$ berada di antara daerah tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah mengujian model regresi agar tidak sama dengan variasi dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya (Sujarweni, 2016). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Pada uji glejser nilai residual absolut diregresiakan dengan variable independen.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B			Beta		
1	(Constant)	.785	.793		.990	.324
	Rasio Solvabilitas Anggaran	.022	.115	.017	.190	.850
	Rasio Kemandirian Keuangan	.010	.385	.002	.026	.979
	Rasio Solvabilitas Layanan	-.033	.053	-.054	-.619	.537

a. Dependent Variable: AbsUt1

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Nilai signifikansi untuk masing-masing variable independen rasio solvabilitas anggaran 0,850; rasio kemandirian keuangan 0,979; dan rasio solvabilitas layanan 0,537. Berdasarkan uji mlejser terlihat bahwa setiap variable penelitian memberikan kontribusi diatas nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas dalam model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variable independen yaitu rasio solvabilitas anggaran, rasio kemandirian keuangan, dan rasio solvabilitas layanan terhadap variable dependen kasus covid 19. Dengan menggunakan SPSS versi 28 berikut hasil analisis regresi:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	15.655	1.396		11.211	<,001
	Rasio Solvabilitas Anggaran	-.412	.202	-.124	-2.042	.043
	Rasio Kemandirian Keuangan	6.545	.678	.588	9.653	<,001
	Rasio Solvabilitas Layanan	-.611	.093	-.391	-6.576	<,001

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan tabel uji regresi berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 15,655 - 0,412X1 + 6,545 X2 - 0,611 X3 + e$$

1. Constant/konstanta sebesar 15,655 menyatakan jika X1 bernilai 0 (rasio solvabilitas anggaran=0), X2 bernilai 0 (rasio kemandirian keuangan=0), dan X3 bernilai 0 (rasio solvabilitas layanan=0) maka kasus covid 19 sebesar 15,655.
2. X1 (rasio solvabilitas anggaran) memiliki koefisien regresi sebesar -0,412 menyatakan bahwa setiap 1% solvabilitas anggaran (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variable lain tetap atau tidak berubah) maka kasus covid 19 diprediksi mengalami penurunan 0,412. Begitu pula sebaliknya jika solvabilitas anggaran turun 1% (dengan asumsi bahwa nilai variable lain tetap atau tidak berubah) maka akan mengalami peningkatan sebesar 0,412.
3. X2 (rasio kemandirian keuangan) mempunyai koefisien regresi sebesar 6,545 menyatakan bahwa setiap 1% kemandirian keuangan pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variable lain tetap atau tidak berubah) maka kasus covid 19 diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 6,545. Begitu pula sebaliknya jika kemandirian keuangan menurun 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variable lain tetap atau tidak berubah) maka kasus covid 19 akan mengalami penurunan 6,545.
4. X3 (rasio solvabilitas layanan) memiliki koefisien regresi sebesar -0,611 menyatakan bahwa setiap 1% solvabilitas layanan pemerintah kabupaten dan kota (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variable lain tetap atau tidak berubah) maka diprediksi adanya penurunan kasus covid 19 sebesar 0,611. Begitu pula sebaliknya jika solvabilitas layanan berkurang 1% (dengan asumsi bahwa nilai koefisien variable lain tetap atau tidak berubah) maka jumlah kasus covid 19 akan meningkat 0,611.

a. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variable-variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variable dependen. Hasil uji statistik f ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Hasil Uji signifikansi Simultan (uji-F)
 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.804	3	9.268	52.780	<,001 ^b
	Residual	23.881	136	.176		
	Total	51.684	139			

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

b. Predictors: (Constant), Rasio Solvabilitas Layanan, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Kemandirian Keuangan

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji simultan maka diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,01 karena nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,001 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dengan kata lain adanya pengaruh secara signifikan antara rasio solvabilitas anggaran, rasio kemandirian keuangan, dan rasio solvabilitas layanan secara simultan atau bersama sama terhadap kasus covid 19 yang terjadi di Kalimantan Barat.

2) Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara parsial. Untuk mengetahui bahwa variabel independen (rasio solvabilitas anggaran, rasio kemandirian keuangan dan rasio solvabilitas layanan) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen (kasus covid 19) maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.655	1.396		11.211	<,001
	Rasio Solvabilitas Anggaran	-.412	.202	-.124	-2.042	.043
	Rasio Kemandirian Keuangan	6.545	.678	.588	9.653	<,001
	Rasio Solvabilitas Layanan	-.611	.093	-.391	-6.576	<,001

a. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial diketahui bahwa rasio solvabilitas anggaran, rasio kemandirian keuangan, dan rasio solvabilitas layanan memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat berpengaruh kepada kasus covid 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran pemerintah daerah sangat berperan dalam menanggulangi sebuah pandemi. Kondisi keuangan yang baik akan memudahkan pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan keuangan akibat pandemi. Pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran akibat covid 19 termasuk

kebutuhan program dan pelayanan publik, peningkatan biaya, dan pertumbuhan permintaan masyarakat atas pelayanan publik (Ministry of Housing, Communities and Local Government, 2021). Pandemi covid 19 akan meningkatkan jumlah belanja daerah dan menurunkan pendapatan. Krisis akibat pandemi berdampak kepada keuangan pemerintah daerah, yaitu meningkatnya belanja dan menurunnya pendapatan (OECD, 2020). Panca pandemi covid 19 pemerintah daerah akan menghadapi kondisi kehidupan baru. Pembatasan aktifitas masyarakat mengakibatkan perlambatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengubah sistem pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien dimasa depan. Tata kelola keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan pembangunan daerah pada pembangunnn infrastruktur yang merata, pelayanan kesehatan yang baik, penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan lainnya. (Zami, 2020)

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan keeratan hubungan variable independen dan variable dependen. Seberapa jauh model regresi dapat menjelaskan variasi variable dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.733 ^a	.538	.528	.41904	2.353

a. Predictors: (Constant), Rasio Solvabilitas Layanan, Rasio Solvabilitas Anggaran, Rasio Kemandirian Keuangan

b. Dependent Variable: Kasus Covid 19

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2021

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa R square sebesar 0,538 atau sebesar 53,8%. Hal ini dapat diartikan variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 53,8% dari variable dependen (kasus covid 19) sedangkan sisanya 47,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variable tersebut. Sementara itu, koefisien korelasi yang ditunjukkan dengan R pada tabel adalah 0,733. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variable dependen (kasus covid 19) dengan variable independen (rasio solvabilitas anggaran, rasio kemandirian keuangan, dan rasio solvabilitas layanan) sebesar 73,3 %.

KESIMPULAN

1. Kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat secara umum berada dalam kondisi baik untuk solvabilitas anggaran dan solvabilitas layanan. Namun, kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Barat dalam kondisi yang kurang baik. Pemerintah daerah di Kalimantan Barat diproyeksikan memiliki kemampuan yang baik dari sisi pemenuhan belanja dimasa pandemi, hal ini digambarkan dengan nilai median rasio solvabilitas anggaran yang berada di 1,2015; 1,2013; 2,1793;

dan 1,0128. Pemerintah daerah di Kalimantan Barat diproyeksikan masih rentan terhadap sumber pendapatan diluar kendalanya baik dari dalam negeri ataupun luar negeri dimasa pandemi covid 19. Hal ini diproyeksikan dengan nilai median rasio kemandirian keuangan yang berada 0,0597 dan 0,0600. Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik dan menyediakan sarana publik bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan median rasio solvabilitas layanan sebesar Rp3.072.878 dan Rp705.509. Kondisi ini diproyeksikan akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dimasa pandemi.

2. Secara simultan terdapat pengaruh kondisi keuangan terhadap kasus covid 19. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dimana nilai sig. 0,001, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji f dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Kasus covid 19 yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat dapat hadapi dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah secara optimal akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi pandemi covid 19. Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada bidang kesehatan menjadi sangat krusial untuk dihadirkan dalam masa pandemi.
3. Secara parsial terdapat pengaruh pada kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat terhadap kasus covid 19:
 - a. terdapat pengaruh secara signifikan atas rasio solvabilitas anggaran terhadap kasus covid 19. hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,043. maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial solvabilitas anggaran berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.
 - b. terdapat pengaruh signifikan atas rasio kemandirian keuangan terhadap kasus covid 19. hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,001. maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.
 - c. terdapat pengaruh signifikan atas solvabilitas layanan terhadap kasus covid 19. hal ini dibuktikan dengan nilai sig. 0,001. maka dengan ini hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial solavbilitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kasus covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Auerbach, A., Gale, B., Lutz, B., & Sheiner, L. (2020). Fiscal Effects of Covid 19. *BPEA Conference Drafts* (pp. 1-60). USA: Brookings Papers on Economic Activity.
- BPS Kalimantan Barat. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat November 2020 Berita Resmi Statistik*. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- BPS RI. (2021, Februari 5). Berita Resmi Statistik. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan-IV 2020*, 13(02), pp. 1-12. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>

- Cipto, P. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 6(1). Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59246>
- Green , D., & Loualiche, E. (2020). *State and Local Government Employment in the Covid 19 Crisis*. Harvard University. Boston: Harvard Business School.
- Haruhiko, K. (2020). COVID-19 and the Global Economy: Impact and Challenges From Asia's Perspective. *The 62nd Annual Meeting of the National Association for Business Economics*. Japan: Bank of Japan.
- Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021, Agustus 11). *Pemerintah Siapkan Strategi Jangka Panjang Menghadapi Pandemi*. (T. K.-1. Nasional, Editor, & Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional) Retrieved September 9, 2021, from Satgas Covid 19: <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-siapkan-strategi-jangka-panjang-menghadapi-pandemi>
- Maizunati, N. A. (2017, April 2). Financial Condition Analysis of Magelang City Government in The city Cluster in Java-Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan* , 2(2).
- Ministry of Housing, Communities and Local Government. (2021). *Local Government finance in the pandemic*. The comptroleer and auditor general. UK: National Audit Office.
- National Association of Countries. (2020). *Covid 19 Impact on country finances dan impilications for the US economy*. USA: NACo.
- OECD. (2020). *The Impact of the Covid 19 crisis on regional and local governments: main findings from the joint CoR-OECD survey*. OECD Regional Development Papers.
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Businees*, 29, 142-164.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28 ed., p. 81). Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS* (1 ed.). (Mona, Ed.) Bantul, Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Baru Press.
- Zami, A. (2020, April). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 3(2), 121-130.